

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abbas Salim, 1993, *Manajemen Transportasi*, Rajagrafindo Persada. Jakarta
- Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Burhan Ashofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta.
- DR.Muhammad Syaifuddin ,SH,M.Hum , 2012,*Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktek Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*,CV Majur Maju, Jakarta.
- Muchtarudin Siregar, 2012, *Beberapa Masalah Ekonomi dan Manajemen Transportasi*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Muljadi A.J, 2009, *Kepariwisata dan Perjalanan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Maulana, 2008, *Kamus Ilmiah Populer*, Yogyakarta.
- Pudyatmoko dan Y. Sri, 2009, *Perizinan, Problem dan Upaya Pembinaan*, Jakarta.
- Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Soegijanta Tjakranegara, 1995, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- _____ dan Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sri Ambarwati, 2008, *Realisasi Tanggung Jawab Perdata Pengangkut Udara Terhadap Penumpang Penerbangan*, Surakarta.
- Tim Redaksi Rana Pustaka, 2012, *Pedoman Mengurus Perijinan dan Dokumen*, Rana Pustaka, Jakarta.

Victor Situmorang, 1989, *Dasar Dasar Hukum Administrasi Negara*, Bina Aksara, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pariwisata.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah.

Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum.

Keputusan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 1016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.

Peraturan Walikota Padang Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang.

C. INTERNET

<https://www.slideshare.net/mobile/FairNurfachrizi/hukum-pengangkutan>, diakses pada tanggal 6 Agustus 2019, Pukul.19.43 WIB.

Ani Nursalikah, "Menjajal Bus Wisata Gratis Keliling Padang", diakses dari republika.co.id/berita/gaya-hidup/travelling/18/04/08/p6v3l6366-menjajal-bus-

wisata-gratis-keliling-padang, (diakses pada tanggal 9 Agustus 2019 Pukul 14:12 WIB).

Lihat [Http//www. Pengajar.Co.Id/Pengertian-Pariwisata](http://www.Pengajar.Co.Id/Pengertian-Pariwisata), diakses pada tanggal 05 Maret 2020, Pukul 11.00 Wib

